

**PROSES REKRUITMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014  
(Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera)**

**SKRIPSI**

**AYU HENIZA  
10.851.0055**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PROSES REKRUITMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014**

**(Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**AYU HENIZA**  
**10.851.0055**

Skripsi sebagai Salah satu Syarat untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Judul Penelitian** : Proses Rekrutmen Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera)

**Nama Mahasiswa** : Ayu Heniza

**NIM** : 10 851 0055

**Program Studi** : Studi Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

  
**Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP**  
Pembimbing I

  
**Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum**  
Pembimbing II

  
**Drs. Amir Furba, MA, Ph.D.**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berjudul “Proses Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera)”. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kepedulian terhadap kinerja para anggota DPRD provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan tingkat penurunan kualitas kerja. Permasalahan dari kinerja anggota DPRD ini karena didasari dari proses rekrutmen calon anggota dewan yang dilakukan di internal partai politik. Peran aktif partai politik sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan calon-calon anggota DPRD guna menunjang peningkatan kualitas kerja para anggota dewan, dalam hal ini peneliti menggunakan teori tipologi rekrutmen politik menurut Fadillah Putra, yakni *tipe partisan*, *tipe compartmentalization*, *tipe immediate survival*, *tipe civil service reform*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan melakukan wawancara terhadap informan yang dinilai kompeten terhadap hal ini, dokumentasi, observasi lapangan serta melakukan studi pustaka dalam proses pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD yang dilakukan PKS dilihat dari tipologi rekrutmen politik yang dikemukakan diatas, namun terlihat pada tahap prosedural proses yang terjadi dilapangan. Sebenarnya PKS dalam hal ini cenderung menggunakan tipe partisan, tipe immediate survival dan tipe civil service reform. ketiga tipe tersebut dominan digunakan dalam proses rekrutmen calon anggota dewan. Sekiranya ketika sudah mengetahui proses rekrutmen calon anggota DPRD di internal PKS dapat menjadi suatu pelajaran dalam mempersiapkan para calon anggota DPRD agar kelak para anggota dewan lebih berkualitas dalam bekerja untuk rakyat.

**Kata Kunci :** Partai Politik, Rekrutmen Politik

## ABSTRACT

*Study conducted by researchers with the title "recruitment process candidates DPRD North Sumatra province in 2014 (study on leadership council prosperous justice party area). This research is done by looking at the performance of concern for legislators in North Sumatra province that showed a decrease in the level of quality of work. performance issues of legislators is because it is based on the candidate recruitment process conducted council members in the party's internal politics. active role of political parties is needed in preparing candidates for the Parliament to support the improvement of the quality of work of the members of the board, in this case the researchers used the theory according to the typology of political recruitment fadillah putra the partisan type, type of compartmentalization, the type of immediate survival, the type of civil service reform. This study used qualitative research methods, descriptive, with an interview of informants who are competent in the value of this, documentation, and field observations to study literature in the process of collecting data to obtain the results of the research. research results in the recruitment of candidates for legislators who do PKS seen from the typology of political recruitment noted above, but look at the procedural stage of the process that occurred in the field. PKS is actually in this case tend to use partisan types, the type of immediate survival and the type of civil service reform. The three dominant type used in the process of recruiting candidates for board members. if and when he is aware of the process of recruiting candidates for members of parliament in internal PKS can be a lesson in preparing candidates for the parliament to bring the members of a higher quality in the works for the people.*

**Keyword : Political Parties, Political Recruitment**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini guna melengkapi tugas akhir yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Adapun judul skripsi yang diajukan penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah : **“PROSES REKRUITMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 (Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara)”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP selaku pembimbing I dan Ibu Anggreni Atmei Lubis SH.M.Hum selaku pembimbing II serta Bapak Rudi Salam Sinaga,S.sos Msi selaku sekretaris dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan masukan positif, saran dan ilmu yang berharga bagi peneliti. Disamping itu ucapan terima kasih penulis kepada pengurus DPW PKS Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu peneliti dalam pemberian informasi dan data bagi peneliti. Serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada keluarga yakni Mama dan Papa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan member inspirasi bagi para pembaca.

Medan, November 2014

Penulis

Ayu Heniza

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Perumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Partai Politik.....	8
2.2 Teori Rekrutmen.....	9
2.3 Pemilihan Umum.....	11
2.4 Tipologi Partai.....	18
2.5 Variabel Penting dalam Proses Rekrutmen dan Pengembangan Kader.....	21
2.6 Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Metode Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26

3.4 Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	29
4.1.1 Sejarah Umum Partai Keadilan Sejahtera.....	29
4.1.2 Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera.....	30
4.1.3 Lambang Partai Keadilan Sejahtera.....	47
4.1.4 Makna Lambang Partai Keadilan Sejahtera.....	47
4.1.5 Struktur Kepengurusan DPW PKS Provinsi SUMUT.....	48
4.1.6 Mekanisme Pemilihan Umum Internal PKS.....	53
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
4.2.1 Deskripsi Data.....	57
4.2.2 Analisis Data.....	58
4.2.3 Penjaringan dan Pemilihan Kandidat Bakal Calon Anggota Dewan PKS Sumatera Utara.....	61
4.2.4 Hasil Wawancara Penelitian.....	67
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal di maksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimed. Karena itu, menurut Budiarjo (2001:160-161) menerangkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana anggotanya telah memiliki orintasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik merupakan tempat representasi sebuah kepentingan yang akan di bawa dalam konteks negara melalui parlemen maka dari itu. Sangatlah penting partai politik mempersiapkan para kader nya untuk duduk di parlemen oleh karena itu partai politik berkewajiban untuk melakukan suatu rekrutmen untuk calon anggota legislatif yang nantinya kader-kader partai akan ditempatkan di parlemen. Rekrutmen merupakan arena membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil. Jika sekarang kapasitas dan legitimasi DPRD sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang belum baik. Karena undang-undang pemilihan umum sekarang telah menerapkan sistem proporsional

terbuka guna memperbaiki kualitas proses rekrutmen parlemen. Bisa kita ambil contoh, bagaimana partai politik yang sedemikian banyaknya hanya beberapa partai politik saja yang dapat bertahan dalam kepemimpinan bangsa. Ini disebabkan kurang seriusnya partai politik dalam menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa, bisa dikatakan hanya beberapa partai politik yang dapat mempersiapkan kader-kader terbaiknya duduk di parlemen. Misalnya partai Golkar, PDIP, partai Demokrat dan PKS. Mereka dari keempat partai besar ini ada salah satu partai yang bisa dikatakan baik dalam proses menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di bangku parlemen yakni PKS.

PKS merupakan partai era reformasi yang terus mengalami perkembangan yang signifikan memiliki jiwa bertarung yang luar biasa dan memiliki konsistensi dalam menegakkan dakwah dan politik serta didukung sumber daya yang unggul dan pantang menyerah. Dan PKS juga dikenal sebagai partai kader yang solid, bisa memperoleh suara yang signifikan pada tahun 2004 yang lalu walau ditahun 2009 PKS mengalami penurunan suara suara. Bagi PKS, politik berguna mendekatkan perjuangan kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai islam itu sesudah pada tingkat kehidupan individu, keluarga, agar ajaran agama islam dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktivitas kontrol, maupun legislasi dengan membuat undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya (dewan syariah pusat PKS, 2006). DPRD merupakan lembaga negara yang mempunyai produk-produk yang bisa mengarahkan negara akan dibawa kemana, tapi hal itu semua

tergantung pada anggota DPRD itu sendiri. Anggota DPRD sering disebut politisi daripada sebutan lainnya. Politisi dan politik cenderung memiliki konotasi negative, padahal politik adalah hal lumrah dalam kehidupan. setiap orang pada dasarnya adalah insan politik.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 1 ayat (4) dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. menurut Juwaeni (2009-25-26) penyebab penilaian negative pada istilah politik dan politis bagi masyarakat disebabkan karena banyak praktek-praktek politik pragmatis dan oportunistis. bukan politik untuk perubahan dan ke arah kebaikan, Ibnu Khaldun (salah satu ilmuwan politik Islam) mengatakan : “berpolitik adalah sarana menuju keteraturan dan sebuah cara menuju peradaban”. Politik oleh sebagian orang disebut sebagai *the power of possibility*, kekuatan kemungkinan. Apapun “mungkin” dalam politik. Namun dalam kekuatan kemungkinan itu sering disalahartikan. Berupa aksentuasi berkonotasi negative antara lain : “dalam politik tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi”. Atau politik ala Machiavelis yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan (kekuasaan).

Anggota legislatif merupakan lembaga perwakilan politik yang dahulu hingga sekarang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili ditempat negara (Pemerintahan). Tahun 2004 sistem pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem proporsional daftar terbuka melalui pemilihan umum (pemilu). Dengan sistem ini, rakyat dapat mengetahui calon anggota legislatif dan asal partai mereka. Dengan sistem ini rakyat dapat mengetahui calon anggota legislatif dan

asal partai mereka. Saat ini yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana proses penetapan calon diinternal partai tersebut, karena ini menjadi faktor penentu kualitas anggota legislatif DPRD. Maka dari itu diadakannya perekrutan calon anggota legislatif DPRD yang salah satu unsur demokratisasi yang ikut menentukan tinggi-rendahnya suatu kualitas demokrasi sebuah sistem politik serta semakin baik mekanisme perekrutan calon legislatif semakin baik pula kualitas demokrasi sebuah sistem politik.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan Mengambil judul, **“Proses Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan Sejahtera)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan perihal dari latar belakang masalah oleh karena itu penelitian ini lebih difokuskan pada proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi Sumatera Utara studi pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera ini bisa di identifikasikan masalah sebagai berikut : “Terdapat sisi kelemahan dalam proses penyiapan bakal calon anggota DPRD di partai politik. terlihat masih kurangnya suatu kualitas anggota DPRD tersebut dalam menjalankan perannya”.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Menurut Mohammad Hatta (1999 : 12), Masalah adalah “kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya,

kita tidak puas dengan hanya melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam”.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi dengan perihal proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi Sumatera Utara pada DPW Partai Keadilan Sejahtera.
2. Lokasi penelitian dalam menyelesaikan masalah-masalah di atas adalah DPW partai keadilan sejahtera provinsi Sumatera Utara jalan kenanga raya no. 51 setia budi medan.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dengan demikian maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 (studi kasus pada DPW Partai Keadilan Sejahtera)”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014 (studi pada Dewan Pimpinan Wilayah provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan Sejahtera)

2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar S-1 dalam bidang Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak, terutama bagi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang studi ilmu sosial dan ilmu politik
  - b. Memperdalam pemahaman tentang proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014 (studi pada Dewan Pimpinan Wilayah provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan Sejahtera).
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi penulis  
Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan.
  - b. Bagi pihak lain  
Diharapkan penelitian ini dapat berguna. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lebih lanjut dalam bidang politik serta sebagai sumber terkait organisasi politik.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang di harapkan. Hampir semua partai politik memiliki tujuan-tujuan yang luhur dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam menunjang kesejahteraan dan keadilan, namun dalam realita perjuangannya tidak sedikit partai politik yang mengkhianati sendiri nilai-nilai perjuangan yang mereka buat sendiri demi kepentingan kekuasaan semata. Dan rakyatlah menjadi “korban” kepentingan kekuasaan semata itu. Walaupun demikian, masih tersimpan asa untuk berharap kepada partai politik dalam memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Kemudian dari beberapa ahli politik mengatakan perihal yang hampir sama mengenai partai politik. Bagaimana partai politik mengelola suatu orientasi , nilai-nilai dan cita-cita yang akan mereka terapkan dalam proses perjuangan mereka dan sebagaimana menurut Miriam budiarjo (2003) menjelaskan bahwa :

“Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana anggotanya telah memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka”.

Kebutuhan adanya partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat dari dampak terjadinya perubahan sosial yang menimbulkan berbagai kritis, maka partai politik memiliki fungsi untuk menanggulangi hal tersebut. Menurut Almond (Agustiono, 2006:95) adapun fungsi partai politik mencakup :

“(1) sosialisasi politik: (2) partisipasi politik: (3) politik: (4) komunikasi politik: (5) artikulasi kepentingan: (6) agregasi kepentingan serta (7) pembuatan kebijakan

Sedangkan menurut Macridis (Agustino, 2006:95) fungsi-fungsi partai politik itu meliputi : (1) representasi (perwakilan) : (2) konversi dan agregasi: (3) integrasi partisipasi , sosialisasi mobilisasi: (4) persuasi, represi ; (5) pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah.

## 2.2. Teori Rekrutmen

Partai politik dalam suatu pengertian modern dapat di definisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk di pilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Pengertian di atas sesuai dengan salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen politik. Pengertian rekrutmen politik menurut Surbakti (Komarudin Sahid, 2011: 129) adalah “seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya”. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat di butuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai memiliki rekrutmen yang berbeda-beda , pola rekrutmen anggota partai di sesuaikan dengan sistem politik yang di anutnya. Di Indonesia sendiri perekrutan politik di adakan secara berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang di usulkan oleh partainya di seleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi di mulai dari

seleksi administratif penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Rekrutmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi / lembaga bersangkutan. Oleh karena itu jika sebuah organisasi / lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu di dasarkan pada kepentingan politik organisasi / lembaga dan usaha itu disebut rekrutmen politik. Adapun pengertian rekrutmen menurut Maitland (2005) rekrutmen adalah proses merencanakan kualifikasi pelamar mencari, menyaring dan memilih seseorang untuk sebuah pekerjaan atau lowongan. Menurut Simamora (2004) rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang di perlukan untuk menutupi kekurangan yang di indentifikasi dalam perencanaan. Dan adapun yang berpendapat rekrutmen politik adalah proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik/lembaga politik untuk di jadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik, dengan cara pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam partai atau pemerintahan dapat melalui kontak pribadi, persuasi, terbuka dan lain-lain. Di era reformasi, rekrutmen politik itu adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem

politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya guna memberikan suatu pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen sendiri dilakukan secara terbuka, semi tertutup bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan di tentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Rekrutmen politik ini sangat menentukan kinerja parlemen dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam kebijakan publik.

Kegiatan perekrutan para bakal calon, mengajukan serta memberi dukungan pada calon yang bersangkutan merupakan bagian dari aktifitas politik yang penting. Dengan demikian partai politik sangat berperan dalam proses pendidikan politik sebagai sumber rekrutmen para pemimpin untuk duduk di legislatif atau eksekutif. Menurut Firmanzah (2011:71-72) mengatakan bahwa “partai politik selain mempunyai peran merekrut regenerasi partai politik , di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya”. Tugas utama yang di emban oleh partai politik dalam hal ini adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan „di adu” dengan partai lain melalui mekanisme pemilu.

### **2.3. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah mekanisme demokrasi langsung. Dalam pemilihan umum, rakyat menentukan bukan hanya calon yang akan di pilih menjadi penyelenggara negara, tetapi juga kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 ayat (1) “pemilihan umum selanjutnya disingkat pemilu, adalah saran pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakn secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara

kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945".Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lain. **Pertama** : sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini menjadi kebutuhan pemerintah, melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintah yang sedang berkuasa ditegakakan, begitu pula kebijakan dan program yang dihasilkannya. **Kedua** :fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, sebagai mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya untuk duduk dalam pemerintahan maupun dalam lembaga legislatif. Tidak ada demokrasi tanpa representasi. **Ketiga** :sebagai mekanisme sirkulasi elite politik. Keterkaitan pemillihan umum dengan sirkulasi elite politik di dasarkan pada asumsi bahwa elite politik berasal dan bertugas mewakili rakyat, pemilihan umum menjadi sarana bagi warganegara untuk mencapai posisi elite politik. **Keempat** : sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal yang di harapkan bisa mencerdaskan masyarakat tentang demokrasi. Sistem pemilihan umum di Indonesia memberikan kesempatan terlalu besar kepada partai politik sekaligus menghambat penyalutan aspirasi politik rakyat karena pencalonan hanya melalui partai politik. Partai politik yang seharusnya di jadikan alat politik oleh warga negara untuk menempuh jalan politik di luar partai politik.

Prosedur pemilihan umum harus memberikan jaminan hak untuk memilih dan dipilih kepada seluruh warganegara. Di dalam negara demokrasi yang memiliki hak untuk di pilih dan untuk memilih pada hakekat nya adalah

warganegara bukan partai politik. UUD 1945 pasal 28 D ayat (3) berbunyi : **setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.** Berdasarkan pemikiran di atas seharusnya calon independen (calon perorangan) baik itu untuk jabatan presiden , anggota DPR , anggota DPD , anggota DPRD , gubernur , walikota , bupati di perbolehkan. Warga negara dapat mengusulkan calonnya melauai partai politik atau langsung di calonkan oleh sekelompok warganegara. Oleh karena itu yang akan bekerja nantinya adalah warganegara terpilih, maka sebaiknya yang dipilih dalam pemilihan anggota legislatif sama dengan pemilihan pimpinan eksekutif yaitu memilih calon bukan memilih partai politik.

#### **Bagan metode rekrutmen dan seleksi pemimpin**



Sistem rekrutmen politik memiliki keragaman walaupun ada dua cara seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan yang dianggap paling penting. Namun di samping dari pada itu ada beberapa metode yang ada dalam rekrutmen politik. Menurut Philip althoff dan Michael rush (Komarudin Sohid, 2011:132-134) yaitu sebagai berikut :

- a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan

Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan admistrasi.

b. Seleksi melalui penyortiran

Salah satu metode tertua yang dipergunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian. Metode ini digunakan di Yunani kuno.

c. Seleksi melalui rotasi atau giliran

Suatu metode yang sama, yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Bentuk ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental sehingga untuk menghindari konflik atau menjaga stabilitas politik baik itu partai politik atau pemerintahan negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.

d. Seleksi melalui perebutan kekuasaan

Suatu metode perebutan lain yang sudah berjalan lama yang umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Akibat yang paling langsung dan nyata dari cara ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik dan perubahan-perubahan dalam personel birokrasi.

e. Seleksi dengan cara patronage

Patronage adalah suatu sistem yang sampai sekarang masih dilakukan di banyak negara berkembang. Dahulu sistem ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19 patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyusunan dan sistem korupsi yang rumit. Yang memasuki banyak

bidang kehidupan masyarakat di Inggris. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum, sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik karena untuk menjadi masuk anggota parlemen dan dinas sipil embrionik hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem patronage.

f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah

Berbeda dengan sistem patronage yang juga cenderung untuk mengekalkan tipe-tipe personel tertentu, ada lagi satu sistem perekrutan yang dapat disebut sebagai “mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah”. Peristiwa ini lebih merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar sistem-sistem politik.

g. Seleksi melalui koopsi.

Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu adalah “koopsi” (*co-option*). Koopsi meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik (Fadillah Putra, 2003) sebagai berikut :

- a. Partisan yaitu merupakan pendukung yang kuat loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa di rekrut untuk menduduki jabatan strategis.
- b. Compartmentalization merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.

- c. Immediate survival yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan di rekrut.
- d. Civil service reform merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Ada beberapa hal menurut czudnowski (sastroatmodjo,1995:121) yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif baik perempuan maupun laki-laki adalah sebagai berikut :

- Social background : faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit di besarkan
- Political socialization : merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- Initial political activity : faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
- Apprenticeship : faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang di incar oleh calon elit.
- Occupational variables : calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dan kualitas kerjanya.
- Motivations : orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.

- Selection : faktor ini menunjukkan pada mekanisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Dengan demikian , partai politik harus mengupayakan penyiapan suatu kader-kader politik yang sangat di butuhkan dalam proses rekrutmen politik tersebut. Menurut Bambang Yudhoyono (Komarudin Sahid, 2011:138-139) kader adalah sebagai berikut.

- a. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas.
- b. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada dibawah kontrol organisasi.
- c. Merupakan orang-orang yang memang di persiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik.

Kaderisasi adalah cara merekrut anggota masyarakat melalui jaringan latihan atau pendidikan tertentu yang di lakukan oleh departemen pemerintah, instansi swasta, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Proses selanjutnya setelah adanya pengkaderan yang dilakukan internal partai politik adalah pencalonan. Jika kader yang telah di rekrut telah memenuhi syarat internal partai politik untuk di calonkan dalam proses tertentu. Pencalonan adalah suatu proses dimana seorang dicalon untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dan nama nya di cantumkan dalam daftar calon sebagai seorang calon. Jadi pencalonan dalam pengertian ini dilakukan organisasi politik melalui rapat-rapat pengurus organisasi untuk menentukan calon itu menjadi anggota organisasi/ lembaga, menjadi pengurus organisasi/ lembaga menjadi anggota badan legislatif.

## 2.4. Tipologi Partai

Tipologi partai adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berdasarkan asas dan tujuan orientasinya, partai politik di klasifikasikan menjadi tiga tipe, meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner dan partai politik kepentingan. Adapun pengertian yaitu :

- a. Partai politik pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
- b. Partai politik doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai pencapaian ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkret dan sistematis dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.
- c. Partai politik kepentingan ialah suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kemudian berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai masa atau lindungan dan partai kader, sedangkan berdasarkan basis sosial dan tujuannya partai politik dapat dibagi dua yakni berdasarkan asas sosial dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan basis sosial, **Almond** menggolongkan partai menjadi empat tipe, *pertama* partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. *Kedua* partai politik ang anggotanya berasal dari kalangan

kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh, dan pengusaha. *Ketiga* partai politik anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti islam, katolik, protestan, hindu dan budha. *Keempat* partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Dan berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga. *Pertama* partai perwakilan kelompok, *kedua* partai pembinaan bangsa dan *ketiga* partai mobilisasi. Dari penggolongan tipologi diatas, maka kategori partai politik Indonesia termasuk tipologi berdasarkan komposisi dan fungsi anggota.

Dalam buku “*memahami ilmu politik*” karangan Ramlan Surbakti, yang termasuk tipologi ini adalah partai massa atau lindungan (patronage) dan partai kader. Dikatakan bahwa partai massa merupakan suatu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi sehingga pemilihan umum dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat dipelihara tetapi masyarakat juga dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakn tertentu. Hampir setiap besar partai politik yang ada saat ini termasuk dalam kategori ini. Kemudian yang dimaksud dengan partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketetapan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa memandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas karena sifatnya yang demikian, partai kader sering kali disebut sebagai partai yang elitis.

Partai keadilan sejahtera (PKS) termasuk kategori dalam hal ini, partai keadilan sejahtera merupakan partai politik yang memiliki ideologi islam dan massa islam sebagai konstituennya. PKS merupakan pelanjut perjuangan partai keadilan (PK) pasca pemilu tahun 1999 yang lalu bertransformasi menjadi partai keadilan sejahtera, PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan professional. Karena itu PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan kearah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Jelas dari tujuan PK-Sejahtera dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera adalah dengan mempersiapkan kader-kader partai yang berkualitas. Dalam hal ini partai sebagai mesin politik menjalankan fungsinya yaitu pendidikan politik dan rekrutmen politik. sistem pengkaderan di PK-Sejahtera bisa dibilang paling ketat dibanding partai-partai lainnya. Untuk menduduki posisi penting dalam tubuh partai, kader haruslah melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh sistem partai. Dari pemaparan diatas bahwa PK-Sejahtera adalah partai politik kader dengan sistem rekrutmen anggota yang ketat, eksklusivitas anggota (kader partai politik) dan konstituen partai yang sebagian besar berasal dari dukungan umat muslim Indonesia dan pengaruhnya yang cukup kuat dimasyarakat. Meskipun pada kongres tahun ini landasan partai berubah menjadi partai nasionalis, namun disini tetap yakin karakter partai yang sudah terinternalisasi akan menempatkan PK-Sejahtera pada platformnya sebagai partai islam dengan kader-kader yang berkualitas dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

## 2.5. Variabel Penting dalam Proses Rekrutmen dan Pengembangan Kader

Ada beberapa variabel penting dalam proses rekrutmen politik, yaitu :

### a. Kualitas Rekrutmen

Partai harus memiliki kualifikasi standar untuk merekrut para kandidat. Biasanya dalam era baru demokras, partai merekrut para kandidat yang bersedia untuk memberikan kompensasi politik dan keuangan untuk pencalonan dirinya. Kualifikasi standar sebaiknya mencakup aspek-aspek, seperti integritas, dekat dengan rakyat (*societal roots*), pengalaman politik, keterampilan dasar, dan sesuai dengan platform partai.

### b. Standarisasi Rekrutmen dan Kepatuhan

Standarisasi rekrutmen harus dilakukan secara konsisten di seluruh kantor daerah partai politik, guna memastikan praktek rekrutmen yang umum dan para kandidat memiliki kualifikasi yang sama diseluruh tingkatan.

### c. Desentralisasi Rekrutmen

Hampir tidak mungkin bagi kantor pusat partai politik untuk memverifikasi seluruh proses seleksi secara efektif, sehingga diperlukan desentralisasi dalam tingkatan tertentu. Kantor pusat partai seharusnya berpartisipasi secara aktif dalam menyeleksi kandidat parlemen di tingkat provinsi dan kecamatan kantor pusat partai seharusnya juga memiliki peran utama dalam mengimplementasikan struktur yang terdesentralisasi, kantor pusat partai hanya menyediakan mekanisme kontrol untuk memastikan unsur kepatuhan sesuai dengan standarisasi yang tersedia dalam penyeleksian. Kantor daerah partai dapat berpartisipasi dalam menyeleksi para kandidat di tingkat administrasi yang lebih tinggi dengan

memberikan masukan dan informasi tentang kandidat. Singkatnya terdapat tiga aspek utama dalam rekrutmen, antara lain kualitas kualifikasi, standarisasi dan kepatuhan dan tingkat desentralisasi.

d. Kualitas Pengembangan Kader

Kegiatan pengembangan kader di dalam partai politik harus berkaitan dengan kualifikasi nominasi. Bahan untuk pengembangan kader harus memasukkan pembangunan integritas, mendorong dan melatih para kader guna membangun kedekatan dengan masyarakat dan program partai politik, pelatihan keterampilan dasar di dalam organisasi, dan promosi ideologi dan platform partai. Pengembangan kader dilakukan guna mencapai tujuan sebagai berikut : pertama, membangun partai dengan sumber internal untuk pemilihan para kandidat dan memastikan proses regenerasi di dalam tubuh partai dengan memunculkan beberapa pemimpin partai masa depan. Kegiatan pengembangan kader yang dilakukan secara regular merupakan indikator kualitas proses di dalam partai.

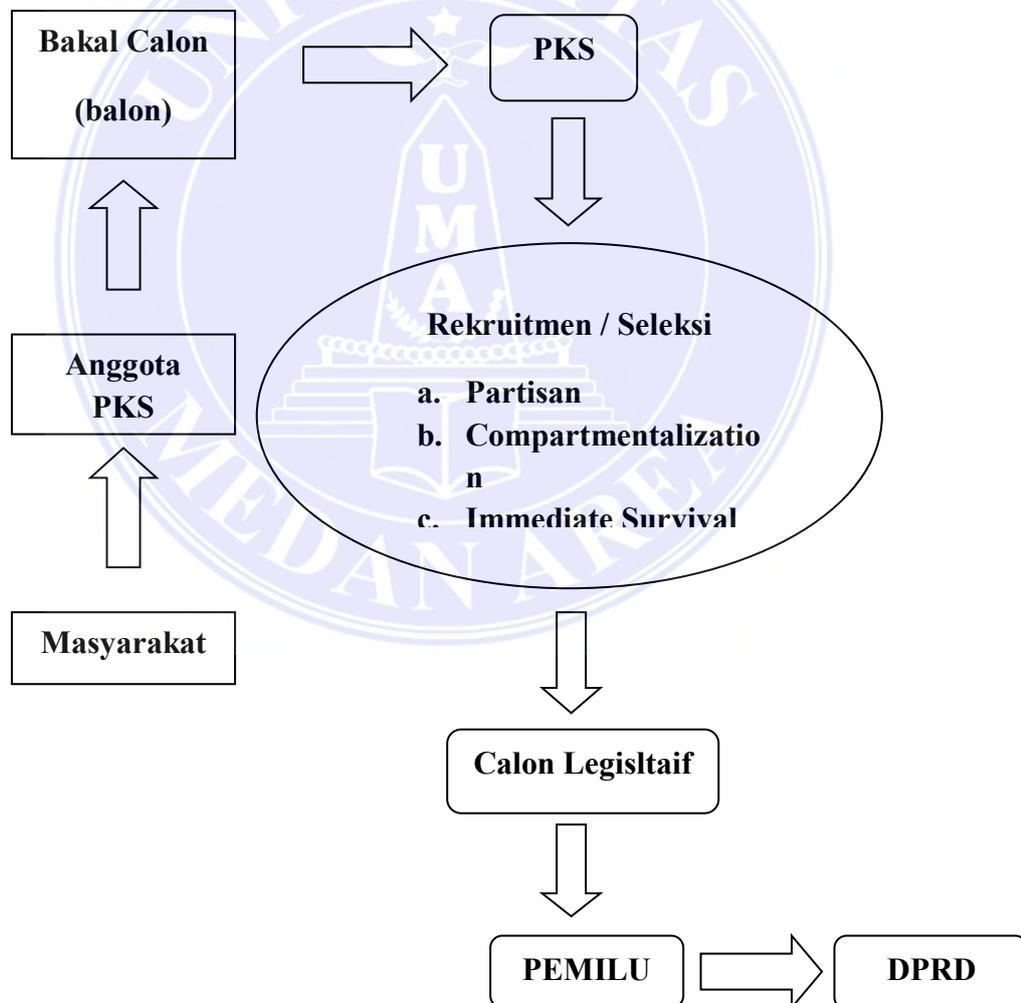
e. Standarisasi, Kepatuhan dan Desentralisasi Pengembangan Kader

Sama halnya dengan rekrutmen, konsistensi di seluruh tingkatan yang berbeda dalam organisasi partai memastikan kader dengan kualitas yang merata. Partisipasi dari anggota partai di tingkatan yang berbeda dalam organisasi juga dapat memastikan efisiensi dalam proses yang berarti kader daerah tidak harus bergantung hanya pada kantor pusat partai.

(<http://asy-iepha.blogspot.com/2012/07/rekrutmen-politik.html>, diakses 27 september 2014)

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi yang sangat penting dari partai politik adalah proses rekrutmen politik. Dalam hal ini peneliti mencoba mengungkap yang seringkali terlupakan pada setiap proses rekrutmen yang terjadi yaitu adanya tahapan pembinaan / pengkaderan, dan peneliti menggunakan pendekatan teori rekrutmen politik. Setelah melakukan rekrutmen politik, partai politik akan melakukan seleksi kandidat untuk menentukan siapa saja kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum mewakili partainya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang di desain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2004: 1) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan menurut Muhiddin Sirat (2006) metode penelitian adalah suatu cara memilih masalah dan penentuan judul penelitian. Dalam penelitian mengenai Proses Rekrutmen Bakal Calon Legislatif tahun 2014 (Studi Pada Calon Legislatif Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan Sejahtera) peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang di ungkapkan oleh **Bogdan** dan **Taylor** (moleong,2005:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa suatu kata-kata tertulis atau sebagai lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini peneliti mencoba penggalan terhadap unit atau individu secara mendalam.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh si peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yakni beralamat di jalan Kenanga Raya No. 51 Setia Budi Medan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan bertujuan mendapatkan informasi, dalam penelitian kualitatif wawancara dilakukan secara mendalam yang merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data secara langsung bertatap muka dengan informan untuk menggali informasi dari masing-masing informan.

2. Observasi

Menurut prof. Heru pada buku metode penelitian kualitatif mengatakan bahwa observasi adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena satu atau sekelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi suatu objek penelitian baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar,

laporan hasil kerja serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis telah dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan direduksi sehingga terbentuk suatu informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil penelitian hingga tahap kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dilapangan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Miles dan Hubern, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Maka dalam kegiatan analisis datanya adalah :

*Pertama*, reduksi data pada tahap ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema terbesar.

*Kedua*, penyajian data dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topic dipisahkan, kemudian topic yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing tempat diberi kode, dikarenakan agar tidak terjadi ketimpangan data yang telah dijaring.

*Ketiga*, data yang telah dikelompokkan sesuai dengan topik-topik, kemudian diteliti kembali dengan cermat mana data yang sudah lengkap dan mana data yang belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 4.3 Simpulan

Berdasarkan penelitian saya mengenai Proses Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014 studi kasus DPW Partai Keadilan Sejahtera, dimana peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Tipologi Rekrutmen Politik menurut M. Fadillah Putra (2003) yang merupakan pembagian tipe-tipe rekrutmen politik. Dalam temuan pada saat penelitian dapat menyimpulkan proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014 studi kasus DPW Partai Keadilan Sejahtera ini masih belum semaksimal mungkin dalam menjalankan rekrutmen tersebut sehingga belum mampu melahirkan dan meningkatkan suatu kualitas anggota DPRD tersebut.

Partai keadilan sejahtera lebih dominan menggunakan *tipe partisan*, *tipe immediate survival*, dan *civil service reform* dalam melaksanakan proses rekrutmen tersebut. Hal ini memperkuat proses yang sudah berjalan di internal PKS, dan *tipe compartmentalization* menjadi suatu nilai tambah bagi pertimbangan yang digunakan dalam tim DPTW. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKS bisa dikatakan sudah baik tetapi harus diperkuat dengan proses pembinaan kader yang lebih optimal. Dalam proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD yang dilakukan oleh PKS tidak mengukur kapabilitas bakal calon hal ini dijelaskan pada test tertulis secara baku yang menyangkut persoalan-persoalan kenegaraan dan terkhusus terkait lembaga legislatif. Namun dalam

menjalankan proses tersebut PKS termasuk terbaik dilihat dari alur rekrutmennya, PKS memiliki alur SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dalam pelaksanaannya dan tertulis. PKS melibatkan seluruh kader inti dalam proses pemilihan umum internal.

#### 4.4 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian Proses Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014, maka dari itu peneliti memberikan saran mengenai dari hasil penelitian tersebut. Adapun saran sebagai berikut:

1. Partai politik seharusnya membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dan tertulis dalam proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD, dalam hal ini guna meminimalisir hal-hal yang tidak sehat (kecurangan) dalam proses penjurangan tersebut.
2. Kepada seluruh calon anggota legislatif sekiranya mempunyai suatu ide-ide kreatif serta program kerja yang sesuai, serta isu pemberantasan korupsi dapat menjadi salah satu agenda program kerja.
3. Partai politik harus meningkatkan daya kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap para anggota DPRD dalam bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung; Cetakan pertama  
Alfabeta.

..... *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung: Cetakan Pertama  
Alfabeta

Budiarjo, Miriam. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Umum

Fadhilla Putra, 2008. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*

....., *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*

Bandung: Alfabeta

Komarudin, Sahid. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia

Panjaitan, Merphin, 2013 *logika demokrasi menyongsong pemilihan umum 2014*,

Jakarta, Permata Aksara

### b. Perundang - undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota

DPR, DPD, DPRD

**c. Website**

[http : // my ardilaya.blogspot.com/tipologi partai PKS](http://myardilaya.blogspot.com/tipologi%20partai%20PKS)

[http: // idilakbar.blogspot.com/tipologi parpol Indonesia](http://idilakbar.blogspot.com/tipologi%20parpol%20Indonesia)

<http://www.pks.or.id>

<http://www.kpu.sumut.go.id>

[\(<http://asy-iepha.blogspot.com/2012/07/rekrutmen-politik.html>\)](http://asy-iepha.blogspot.com/2012/07/rekrutmen-politik.html)

